



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

- Nama : KIN ISURA GINTING
- Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
- NHK : 136543

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.660.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 2.950.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/80 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
- Tanah Seluas 1.223 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , WARISAN Rp. 4.510.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.000.000

- MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 33.289.585

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.884.389.585

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.884.389.585

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.